

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Ahmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arto, A.M., 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2014, *Perihal Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmaja, G.M.W., 2018, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Griffith, J.A.G., 1985, *The Politics of Judiciary*, Fontana Press, California.
- Hadjon, P.M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hailsham, A.L., 1978, *The Dilemma of Democracy*, Collins Press, London.
- Harahap, Yahya, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasani, Ismail dan A. Gani Abdullah, 2006, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Hommel, V.A., 1999, *Logica en Rechtsvinding*, Vrije Universiteit, Amsterdam.

- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Kamil, Achmad, 2012, *Filosafat Kebebasan Hakim*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2009, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Lumbuun, R.S., 2011, *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- , 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- McCloskey, R.G., 2005, *The American Supreme Court 4<sup>th</sup> Edition*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhtaj, M.E., 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mutiara, D., 1961, *Ilmu Tata Negara Lengkap*, Pustaka Islam, Jakarta.
- Pontier, J.A., 2000, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rusmala, E.T., 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

Said, Sahlan, 1995, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman-Pengalaman Praktik Menuju Kemandirian Hakim, Tolak Ukur, dan Kendalanya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

Soeprapto, M.F.I., 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Proses, dan Teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

-----, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Syamsuddin, Muhammad, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Thaib, Dahlan, Jaiz Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Utrecht, E., 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

### C. SKRIPSI/PENELITIAN/JURNAL

- Attamimi, A.H.S., 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Kasus Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, *Disertasi*, Pascasarjana FH UI, Jakarta.
- Nalle, V.I.W., 2013, “Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009)”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Nasution, I.B., 2014, “Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sidharta, Arief, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *Jentera (Jurnal Hukum Rule of Law)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Edisi 3 Tahun II, 2004.
- Simanjuntak, Enrico, “Artikel Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan”, *Majalah Varia Peradilan* No. 305, April 2011.
- Subekti, Raden, “Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang”, *Makalah*, Seminar Hukum Nasional IV Majalah BPHN, 1992.
- Tedjonegoro, J.H., “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (*The Independence of The Judiciary*) & Pelaksanaan Kekuasaan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 19, 2004.
- Yuniagara, Riki, Eddy Purnama, dan M.S. Sjafei, “Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017.

### D. INTERNET

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, “Legislasi Semu(*Pseudowetgeving*)”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-pseudowetgeving.html>, diakses 25 Februari 2019.

## **E. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2009 perihal Pengujian Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksana Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, 9 Desember 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 P/HUM/2016 perihal Pengujian Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa, 24 Januari 2017.